

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI  
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS  
DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP  
BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
JAWA TENGAH PERIODE 2013-2014**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Disusun Oleh:**

**JATI DWI APRIYANTO**

**B200 120 369**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2016**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2013-2014**

#### **PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh :

**JATI DWI APRIYANTO**

**B200 120 369**

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



**(Drs. Wahyono, Ak, MA)**

## HALAMAN PENGESAHAN

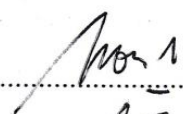


# **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2013-2014**

OLEH :

**JATI DWI APRIYANTO**  
**B200120369**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Sabtu, 22 Oktober 2016  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Dr. Noer Sasongko, M.Si., CA., AK<br>(Ketua Dewan Penguji)  | (.....  ) |
| 2. Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si.<br>(Anggota 1 Dewan Penguji) | (.....  ) |
| 3. Drs. Atwal Arifin, M.Si., AK<br>(Anggota 2 Dewan Penguji)   | (.....  ) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



**(Dr. Triyono, SE., M.Si.)**

**NIK. 642/0627016801**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya

Surakarta. 3 November 2016

Penulis



JATI DWI APRIYANTO  
B200120369

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI  
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN  
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA  
MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE  
2013-2014**

**Abstrak**

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam meningkatkan pelayanan dan kebutuhan di berbagai sektor salah satunya sector publik, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan alokasi belanja modal yang lebih tinggi guna pembangunan sektor-sektor yang bermanfaat pada masing-masing daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara bersama-sama terhadap pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh, dimana seluruh populasi akan dijadikan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi jawa tengah tahun 2013-2014. Dimana Provinsi jawa tengah terdapat 35 pemerintahan daerah yang terdiri dari 29 pemerintahan kabupaten dan 6 pemerintahan kota. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran kabupaten/kota di Provinsi jawa tengah yang telah di audit oleh BPK. Hasil pengujian menunjukan PAD, DAK, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi jawatengah, namun pertumbuhan ekonomi dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi jawa tengah.

Kata Kunci : Belanja Modal, PertumbuhanEkonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

***Abstract***

*Implementation of fiscal decentralization in improving services and needs in various sectors of the public sector one, giving authority to local governments to provide capital expenditure for the development of higher beneficial sectors in each region. The purpose of this research is to obtain empirical evidences of the influence of Economic Growth, Local Own Revenue (PAD), General Purpose Grant (DAU), Special Purpose Grant (DAK), and Surplus of budget financing altogether in allocating capital expenditure in districts/cities in central java province. In this study, the sampling method used was saturated sampling technique, where the entire population to be sampled. Population in this study is all local governments In central java Province for year of 2013 – 2014. In java central Province, there are 35 local governments which consist of 29 districts and 6 cities. The data used is Budget Realisation Statements of districts/cities in*

*central java Province which had been audited by BPK. The test results showed PAD, DAK, and SiLPA positive and significant impact on capital expenditures in the Districts / Cities in central java Province, while economic growth and DAU have not significant effect on capital expenditure in the Districts / Cities in central java Province.*

**Keywords :** *Capital Expenditure, Economic Growth, Local Own Revenue (PAD), General Purpose Grant (DAU), Special Purpose Grant (DAK), and Surplus of Budget Financing (SiLPA)*

## **1. PENDAHULUAN**

Berdasarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri kegiatan pemerintah termasuk membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk belanja daerah, guna melaksanakan kegiatan tersebut yang nantinya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, maka urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah akan diperbaiki dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga dijadikan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pemerintah dituntut untuk mengembangkan dan memberikan proporsi alokasi belanja modal yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang dianggap produktif, misalnya melakukan aktivitas pembangunan.

Peran pemerintah didalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator, karena pihak pemerintahan yang lebih mengetahui sarana tujuan pembangunan yang akan dicapai (Armayani dalam Halim, 2004). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik, karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah, karena terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah yang sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Indarti dan Sugiartina, 2012).

## **2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1 Teori Keagenan (*agency theory*)**

Dalam teori keagenan Jensen dan Meckling (1976), menyatakan hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih (prinsipal) melimpahkan wewenang kepada orang lain (agen) untuk kepentingan mereka. Kaitan *agency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diproksikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (prinsipal) dengan Pemerintah Daerah (agen).

### **2.2 Pengembangan Hipotesis**

#### **2.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal**

Menurut Budiyono (2010) pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa perluasan kegiatan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Secara teoritis dinyatakan pengalokasian belanja modal secara tepat sasaran akan mampu meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah. Hasil penelitian Arwati dan

Hadiati (2013), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal berlawanan dengan hasil penelitian Qooima (2012), menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

H<sub>1</sub> : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal.

### **2.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu mendorong peningkatan alokasi belanja modal daerah. Hasil penelitian Arwati dan Hadiati (2013) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal berlawanan dengan hasil penelitian Dewi dan Suyanto (2014) dan Sugiardi dan Supadmi (2014) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

H<sub>2</sub> : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

### **2.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Menurut Putro dan Pamudji (2011) Dana Alokasi Umum adalah salah satu sumber pendapatan dari pemerintah pusat yang dialokasikan sebagai bentuk pemerataan serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penelitian Arwati dan Hadiati (2013) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal berlawanan dengan hasil penelitian Permana, Dhani (2012), menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

H<sub>3</sub> : Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.



#### **2.2.4 Pengaruh Dana Alokasi khusus Terhadap Belanja Modal**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang di alokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN yang merupakan urusan Daerah. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping. Hasil penelitian Darmayasa dan Suandi, (2014) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal berlawanan dengan hasil penelitian Sulistyowati (2011) menunjukkan bahwa Dana Alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

H<sub>4</sub> : Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

#### **2.2.5 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal**

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus ternjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan. Hasil penelitian Sugiardi dan Supadmi, (2014) menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal berlawanan dengan hasil penelitian Kumorotomo (2010) menunjukkan bahwa Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

H<sub>5</sub> : Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja Modal

### 3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2013-2014. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh, dimana seluruh populasi akan dijadikan sampel. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kabupaten/kota yang mengeluarkan laporan realisasi APBD selama periode 2013-2014 yang dipublikasikan pada situs [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) dan [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) Data yang dibutuhkan secara lengkap sesuai yang dibutuhkan atau setiap Kabupaten/kota dengan lengkap mempublikasikan antara tahun 2013-2014.

#### 3.1 Variabel Dependen

##### **Belanja Modal**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun standar, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pengukuran (*proxy*) yang digunakan adalah persentase perbandingan antara belanja modal dengan total belanja yang menggunakan skala rasio.

**Belanja Modal** = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya.

#### 3.2 Variabel Independen

##### **3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan dari suatu proses pembangunan yang berjalan. Proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat

(BPS, 2008: 1 ). Pertumbuhan ekonomi tersebut diproksikan dengan PDRB harga berlaku dengan menggunakan skala rasio.

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = (\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1}) / (\text{PDRBt-1}) \times 100\%$$

➤ Keterangan : PDRBt: Produk Domestik Regional Bruto Tahun Sekarang

PDRBt-1: Produk Domestik Regional Bruto Tahun lalu

### 3.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengukuran (*proxy*) yang digunakan adalah persentase perbandingan antara PAD dengan total pendapatanyang menggunakan skala rasio

**Pendapatan Asli Daerah** = Hasil Pajak Daerah + Restribusi Daerah + Pendapatan dari Laba Perusahaan + Lain Pendapatan yang Sah.

### 3.2.3 Dana Alokasi Umum

UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa DAU merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Pengukuran (*proxy*) yang digunakan adalah persentase perbandingan antara Dana Alokasi Umum dengan total pendapatanyang menggunakan skala rasio

**DAU** = Alokasi Dasar + Celah Fiskal.

### 3.2.4 Dana Alokasi Khusus

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN yang merupakan urusan Daerah. Pengukuran (*proxy*) yang digunakan adalah total dana transfer dari pemerintah pusat bersifat khusus dengan menggunakan skala rasio.

**DAK** = Bobot daerah : Bobot Teknis

### 3.2.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pengukuran (*proxy*) yang digunakan adalah persentase perbandingan antara SiLPA dengan total penerimaan pembiayaan yang menggunakan skala rasio.

**SiLPA** = Surplus/Defisit Realisasi Anggaran + Pembiayaan Neto.

## 3.3 Metode Analisis Data

Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Analisis ini digunakan untuk meneliti pengaruh  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$ , dan  $X_5$  terhadap  $Y$  dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu:

$$BM = \alpha + \beta_1 PE + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + \beta_4 DAK + \beta_5 SiLPA + e$$

Keterangan:

BM : Belanja Modal

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1$ - $\beta_5$  : Koefisien Regresi

PE : Pertumbuhan Ekonomi

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
E	: Kesalahan Residual

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas) dengan tujuan mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Tabel 4.1  
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Parameter	Koef. Regresi	Std. Error	T	Sig
Konstanta	36169,190	67482,411	0,536	0,594
PDRB	-330422,462	592121,381	-0,558	0,579
PAD	0,630	0,076	8,233	0,000
DAU	0,001	0,066	0,014	0,989
DAK	1,646	0,724	2,272	0,026
SiLPA	0,460	0,100	4,590	0,000

Sumber : Data diolah 2016

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PE + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + \beta_4 DAK + \beta_5 SiLPA + e$$

Interpretasi:

- 1) Nilai konstanta = 36169,190 bernilai positif. Artinya belanja modal sebesar 36169,190 dengan ketentuan variabel dalam penelitian ini tidak dimasukkan dalam persamaan regresi atau bernilai konstan (0).
- 2) Nilai koefisien regresi variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) ( $b_1$ ) bernilai negatif sebesar -330422,462. Artinya apabila Pertumbuhan Ekonomi (PE) naik 1 satuan maka akan menurunkan Belanja Modal

(BM) sebesar 330422,462, dengan ketentuan variabel lain bernilai konstan (0).

- 3) Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $b_2$ ) bernilai positif sebesar 0,630. Artinya apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 1 satuan maka akan meningkatkan Belanja Modal (BM) sebesar 0,630, dengan ketentuan variabel lain bernilai konstan (0).
- 4) Nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (DAU) ( $b_3$ ) bernilai positif sebesar 0,001. Artinya apabila Dana Alokasi Umum (DAU) naik 1 satuan maka akan meningkatkan Belanja Modal (BM) sebesar 0,001, dengan ketentuan variabel lain bernilai konstan (0).
- 5) Nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) ( $b_4$ ) bernilai positif sebesar 1,646. Artinya apabila Dana Alokasi Khusus (DAK) naik 1 satuan maka akan meningkatkan Belanja Modal (BM) sebesar 1,646, dengan ketentuan variabel lain bernilai konstan (0).
- 6) Nilai koefisien regresi variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ( $b_5$ ) bernilai positif sebesar 0,046. Artinya apabila Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) naik 1 satuan maka akan meningkatkan Belanja Modal (BM) sebesar 0,046, dengan ketentuan variabel lain bernilai konstan (0).

## **5. DISKUSI**

### **5.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.**

Berdasarkan hasil uji  $t$  diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai  $t$  hitung -0,558 lebih kecil dari  $t$  tabel sebesar 1,982 dan diperoleh nilai signifikan 0,579 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ( $0,579 > 0,05$ ). Hipotesis satu ( $H_1$ ) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota diprovinsi Jawa Tengah periode 2013-2014. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Arwati dan Hadiati (2013); Dewi dan Suyanto (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap

pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.

Secara teoritis dinyatakan bahwa pengalokasian belanja modal secara tepat sasaran akan mampu meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah. karena pertumbuhan ekonomi tercipta dari infrastruktur atau sarana dan prasarana yang baik, infrastuktur atau sarana dan prasarana berasal dari belanja modal yang baik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada penelitian ini pemerintah daerah tidak mengalokasikan belanja modalnya secara tidak tetap sasaran.

## **5.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.**

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai t hitung 8,233 lebih besar dari t tabel sebesar 1,988 dan diperoleh nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hipotesis kedua (H2) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap terhadap belanja modal kabupaten/kota diprovinsi jawa tengah periode 2013-2014. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Aprizay, dkk (2014) dan Dewi dan Suyanto (2014) yang berhasil membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal periode 2013-2014.

Hal ini disebabkan karena PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya. Kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi

daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan Pendapatan daerah. Semakin besar upaya maksimalisasi PAD yang dilakukan suatu daerah, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu mendorong peningkatan alokasi belanja modal daerah.

### **5.3 Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.**

Berdasarkan hasil uji  $t$  diketahui bahwa dana alokasi umum mempunyai  $t$  hitung 0,014 lebih kecil dari  $t$  tabel sebesar 1,988 dan diperoleh nilai signifikan 0,989 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ( $0,989 > 0,05$ ). Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap terhadap belanja modal kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah periode 2013-2014. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Arwati dan Hadiati (2013), dimana dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.

Dana alokasi umum yang selama ini diterima oleh daerah diindikasikan tidak digunakan untuk pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat dalam alokasi belanja modal seperti pada penelitian yang dilakukan pada 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. DAU bersifat "Block Grant", memungkinkan daerah menggunakan sesuai



dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Dari olah data dan hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa DAU yang diterima oleh daerah hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.

#### **5.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.**

Berdasarkan hasil uji  $t$  diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus mempunyai  $t$  hitung 2,272 lebih besar dari  $t$  tabel sebesar 1,988 dan diperoleh nilai signifikan 0,026 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ( $0,026 < 0,05$ ). Hipotesis keempat ( $H_4$ ) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja terhadap belanja modal kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah periode 2013-2014. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Darmayasa dan Suandi, (2014) menemukan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian pada Belanja Modal Pemerintah provinsi di Indonesia.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2014 dalam rangka membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional telah digunakan secara tepat untuk peningkatan sarana dan prasarana maupun pembangunan infrastruktur melalui peningkatan alokasi belanja modal. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pemberian dana alokasi khusus kepada pemerintah daerah yaitu dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang merupakan urusan daerah, terutama infrastruktur. Semakin besar dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah, maka akan dialokasikan untuk meningkatkan belanja modal.

### **5.5 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.**

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mempunyai t hitung lebih besar dari t tabel sebesar 4,590 dan diperoleh nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hipotesis kelima (H5) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sisa lebih pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap terhadap belanja modal kabupaten/kota diprovinsi jawa tengah periode 2013-2014. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2014) yang menyatakan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pengaruh yang dihasilkan yaitu positif artinya Hal ini menunjukkan bahwa Pemda/kota telah berhasil menggunakan SiLPA untuk pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk kepada pelayanan publik. Presiden Republik Indonesia telah menegaskan bahwa SiLPA yang dihasilkan dari efisiensi APBD hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

## **6. KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja modal kabupaten/kota diprovinsi jawa tengah periode 2013-2014. Penelitian ini dilakukan selama tahun 2013-2014 dengan jumlah sampel 70 kabupaten/kota. Berdasarkan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan pertumbuhan ekonomi dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprizay, Yudi Satrya dan Darwanis, 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. ISSN 2302-0164 Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (2014):140- 149
- Arwati, Dini dan Hadiati, Novita. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat*. ISBN: 979-26-0266-6 Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013): 498-507
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2008, *PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2006-2008*, Bandung.
- Dhani, Khoirunisa Kesuma. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Darmayasa, I Nyoman dan Suandi I Ketut. 2014. *Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal Dalam APBD Pemerintah Provinsi*. SNA 17 Mataram, Lombok Universitas Mataram 24-27 Sept 2014: 1-24
- Dewi, Siska Puspita dan Suyanto. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah*. ISSN 1829-7978 Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa Yogyakarta Vol 20 No. 2 Januari (2014): 78-100.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali*. *Jurnal Ekonomi STEI* No.2/Tahun XIII/25.
- Halim, Abdul. 2014. *Perpajakan : konsep, aplikasi, contoh dan studi kasus*. Jakarta : Salemba empat.
- Indarti dan sugiartina, 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran belanja modal di kota semarang periode 2005-2009*. Fokus ekonomi volume: 7 nomor : 1-15
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure* . *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. Available from: <http://papers.ssrn.com>

- Jiwatami, Sandhyakalaning. 2013. *Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012)*. Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25-28 September 2013.
- Kumorotomo, wahyudi. 2010. *Akuntabilitas anggaran publik: isu politik, prioritas belanja dan silpa dalam alokasi apbd di beberapa daerah*. Makalah dipaparkan pada konferensi Administrasi Negara ke-3, Bandung
- Mahmudi. 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- Peraturan Pemerintah. 2010. Nomor 71 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Putro, Nugroho S & Pamujdi, Sugeng. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan asli daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Belanja Modal*.
- Qooima, Anggita Aprillia (2012) *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain Lain Pendapatan yang Sah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten Se-eks Karesidenan Pati*. Tugas Akhir Diploma thesis, Universitas Muria kodus.
- Sugiarthi, Ni Putu Dwi Eka Rini dan Supadmi, Ni Luh. 2014. *Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi*. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014): 477- 495.
- Sulistyowati, Diah. 2011. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang No.33 Tahun 2004.tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
- [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan [www.dpj.k.depkeu.go.id](http://www.dpj.k.depkeu.go.id)